



ARTI PENTING KEANGGOTAAN INDONESIA DI DEWAN IMO

Rizki Roza*)

Abstrak

Majelis International Maritime Organization kembali melaksanakan sidang dua tahunannya. Salah satu agenda pentingnya adalah memilih Anggota Dewan IMO untuk Periode 2018-2019. Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah dan berhasil terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO. IMO memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kemaritiman internasional karena memiliki otoritas untuk menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup maritim. Indonesia, di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi sedang berusaha membangun Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan visi maritim tersebut, banyak kepentingan nasional Indonesia yang beririsan dengan ketentuan-ketentuan IMO. Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempengaruhi upaya-upaya penguatan norma dan kebijakan IMO agar tidak merugikan kepentingan maritim Indonesia. Menjadi Anggota Dewan IMO juga merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap nilai strategis Indonesia sebagai negara maritim. DPR RI memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah memperkuat instrumen-instrumen pengamanan dan penyelamatan di laut, agar Indonesia dapat dipandang sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.

Pendahuluan

Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) kembali mengadakan Sidang Majelis yang ke-30 di Kantor Pusat IMO di London, Inggris pada tanggal 27 November sampai dengan 6 Desember lalu. Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pencegahan polusi laut, sidang IMO ini dipandang

dapat mempengaruhi arah perkembangan kemaritiman internasional. Salah satu agenda penting Sidang IMO adalah pemilihan anggota *IMO Council* (Dewan IMO) yang merupakan badan pelaksana di bawah *Assembly* (Majelis), yang bertugas mengelola kegiatan organisasi dan juga sebagai pengambil kebijakan.

Delegasi Indonesia, yang terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan kemaritiman nasional, turut menghadiri sidang tersebut.

*) Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id



Delegasi Indonesia hadir dengan membawa misi penting yaitu mengupayakan terpilihnya kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C. Menteri Perhubungan selaku pimpinan delegasi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menyukseskan upaya tersebut. Berdasarkan pemilihan yang dilakukan di sela-sela Sidang Majelis IMO, pada 1 Desember lalu Indonesia dinyatakan berhasil terpilih sebagai salah satu anggota Dewan IMO periode 2018-2019. Tulisan singkat ini berupaya memberikan gambaran mengenai apa peran penting IMO bagi perkembangan kemaritiman internasional dan apa kepentingan maritim Indonesia, sehingga kemudian dapat dijelaskan mengapa Indonesia berkepentingan untuk menjadi Anggota Dewan IMO.

Peran IMO bagi Kemaritiman Internasional

Pelayaran internasional berperan terhadap 80% perdagangan internasional. Hingga saat ini, pelayaran masih dianggap sebagai metode transportasi barang secara internasional yang paling efisien dan efektif dari segi biaya. Pelayaran juga memiliki peran penting bagi kemakmuran berbagai bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelancaran pelayaran internasional sangat bergantung pada keselamatan, keamanan, dan efisiensi industri pelayaran internasional, sehingga dibutuhkan kerangka aturan yang dipatuhi semua pihak untuk kepentingan bersama.

Mengatur industri pelayaran internasional yang melibatkan banyak negara hanya dapat dilakukan dengan efektif jika berdasarkan regulasi dan standar yang telah mereka sepakati bersama. Dengan demikian, beranggotakan 172 negara, IMO menjadi forum penting di mana seluruh pelaku industri pelayaran internasional dapat bertemu dan menyepakati bersama aturan yang akan mengatur mereka.

Dibentuk pada tahun 1948, yang awalnya dikenal sebagai *International Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO), IMO merupakan badan khusus PBB. IMO merupakan otoritas internasional yang menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup maritim yang terkait dengan pelayaran internasional. IMO berperan untuk menyusun kerangka aturan yang adil dan efektif, serta secara universal dapat diterima dan diimplementasikan bagi

industri pelayaran. IMO berusaha memastikan para pelaku industri pelayaran tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup dalam mengejar keuntungan. IMO mendorong kerja sama antarpemerintah dan antarindustri pelayaran untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan maritim, serta untuk mencegah polusi air laut.

Konvensi SOLAS (*the International Convention for the Safety of Life at Sea*) merupakan salah satu ketentuan internasional yang sangat penting bagi keselamatan maritim yang disusun oleh IMO. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk menentukan standar minimum konstruksi, perlengkapan, dan operasi kapal yang sesuai dengan keselamatan. Salah satu ketentuan dalam konvensi juga mengatur tentang *Search and Rescue* (SAR) di laut. SOLAS meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pelayanan SAR untuk merespon permintaan pertolongan di laut sekitar negaranya.

Tidak hanya terkait keselamatan, polusi di laut juga menjadi perhatian dan pengaturan di bawah IMO. Terus meningkatnya pertumbuhan transportasi minyak melewati laut dan semakin besarnya kapal tanker pembawa minyak yang melewati laut, terutama insiden *Torrey Canyon* pada 1967 yang menyebabkan 120.000 ton minyak tumpah di laut, IMO memberi perhatian lebih besar terhadap isu ini. IMO terus berusaha mengembangkan pengaturan dan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kapal tanker dan meminimalisir dampaknya. Ketentuan-ketentuan yang dihasilkan IMO kemudian juga berusaha memastikan pihak-pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan polusi terkait aktivitas pelayaran dapat memperoleh kompensasi. Ketentuan-ketentuan IMO terus berkembang dan diamandemen untuk mengikuti perkembangan teknologi dan persoalan yang ditimbulkannya.

Kepentingan Maritim Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang, yang berada pada jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia yang menghubungkan dua samudera strategis, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia yang 2/3 di antaranya merupakan lautan, memiliki potensi dan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Arah pembangunan Indonesia yang selama ini

berbasis darat cenderung mengabaikan potensi-potensi dan nilai strategis itu. Menyadari hal tersebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan visi maritimnya sebagai arah baru pembangunan Indonesia menuju masa depan. Jokowi ingin membawa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Jokowi untuk pertama kalinya menyampaikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di hadapan forum internasional yaitu melalui KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki agenda pembangunan yang terdiri dari lima pilar, yaitu: pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia; kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut; ketiga mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim; keempat, diplomasi maritim; dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim, merupakan beberapa bagian penting yang akan dikerjakan pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selain itu pemerintahan Jokowi juga akan membangun kekuatan pertahanan yang tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Arti Penting Keanggotaan Dewan IMO

Lembaga tertinggi IMO yang dikenal sebagai Majelis IMO terdiri dari perwakilan seluruh negara anggota IMO yang bersidang sekali dalam dua tahun. Majelis IMO bertugas untuk mengesahkan program kerja, voting anggaran, mengesahkan resolusi teknis, menentukan sumber anggaran dan memilih anggota Dewan. Dewan IMO menjadi organ eksekutif organisasi yang melaksanakan tugas-tugas organisasi IMO di antara dua masa Sidang Majelis dan bertanggung jawab kepada Majelis. Dewan adalah pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh Komite IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO.

Dewan IMO beranggotakan 40 negara yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Kategori A, B, dan C. Dewan IMO Kategori A beranggotakan 10 negara yang memiliki peranan dan kepentingan dalam memberikan *international shipping services* (memiliki armada pelayaran niaga terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar; Kategori B beranggotakan 10 negara yang memiliki kepentingan terbesar dalam perdagangan internasional melalui laut (*international seaborne trade*); sedangkan Kategori C adalah 20 negara yang tidak termasuk dalam kategori A dan B, namun memiliki kepentingan khusus dalam bidang transportasi maritim atau navigasi, dan merepresentasikan kawasan-kawasan geografis utama dunia.

Indonesia secara resmi menjadi anggota IMO sejak tanggal 18 Januari 1961. Indonesia pertama kali mencalonkan dan terpilih menjadi anggota Dewan IMO pada tahun 1973 untuk periode keanggotaan 1973-1975. Meskipun Indonesia hampir selalu mampu terpilih menjadi anggota Dewan IMO (tidak terpilih untuk periode 1975-1977 dan 1977-1979), tampaknya pemerintah berupaya cukup serius agar kembali terpilih untuk periode keanggotaan 2018-2019. Upaya tersebut tentu diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional.

Indonesia, sebagaimana setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Sebagian negara dapat melindungi atau mencapai tujuan-tujuan nasionalnya tanpa mengganggu kepentingan negara lain, namun tidak jarang juga dapat menjadi ancaman bagi kepentingan satu sama lain. Sebagian negara juga berpandangan bahwa akan lebih efisien untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan negara lain, yaitu dengan mengoordinasikan kebijakan, membangun sistem timbal balik, dan menyusun serangkaian aturan, norma, dan peraturan yang memungkinkan mereka menjalankan hubungan dengan lebih stabil dan terprediksi.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tampak jelas bahwa banyak kepentingan nasional Indonesia yang beririsan dengan ketentuan dan kewenangan IMO. Misalnya dalam upaya Indonesia membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, tol laut, dan industri perkapalan, harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi SOLAS. Demikian pula dengan keinginan pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran

internasional yang melewati wilayah perairan Indonesia. Dilewati lebih dari separuh pelayaran perdagangan dunia setiap tahunnya, yaitu melalui Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, yang kemudian sebagian besar melanjutkan ke Laut China Selatan menuju China, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, menempatkan perairan Indonesia jalur perdagangan terpenting dan tersibuk di dunia. Konsekuensinya adalah perairan Indonesia memiliki potensi kecelakaan di laut yang tidak rendah, termasuk terjadinya polusi laut akibat yang dapat merugikan Indonesia. Dengan segala keterbatasan sumber daya saat ini, akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk turut menentukan arah dan kebijakan IMO, serta arah pengembangan transportasi laut dunia, khususnya di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. IMO merupakan forum di mana Indonesia dapat mempengaruhi upaya-upaya penguatan norma dan kebijakan IMO di bidang kemaritiman agar tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya, turut mempengaruhi parameter untuk mengatasi isu-isu mekanisme tanggungjawab dan kompensasi lintas batas terhadap kerusakan yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, tentu menjadi salah satu kepentingan Indonesia di IMO. Keanggotaan Indonesia pada Dewan IMO dapat berkontribusi bagi penguatan lima pilar pembangunan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selain itu, menjadi anggota Dewan IMO juga merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap nilai strategis Indonesia dalam menentukan kebijakan transportasi laut internasional.

Penutup

IMO memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pembangunan kemaritiman internasional. Ketentuan-ketentuan internasional yang dihasilkan IMO terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pencegahan polusi laut, menjadi pedoman bagi seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia. Dengan visi Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan IMO tidak merugikan kepentingan

maritim nasional Indonesia, atau bahkan dapat berkontribusi bagi terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berpengaruh. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempertahankan keanggotaan Indonesia di Dewan IMO, serta memperoleh pengakuan internasional atas komitmen Indonesia untuk turut mewujudkan pelayaran internasional yang aman dan selamat.

Posisi dan kondisi geografis Indonesia tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai negara yang strategis bagi pelayaran internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan yang cukup besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. DPR RI memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah membangun lima pilar pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Misalnya dengan memberikan dukungan anggaran untuk memperkuat instrumen-instrumen pengamanan dan penyelamatan di laut, sehingga Indonesia dapat dipandang dan dipercaya sebagai negara maritim yang bertanggung jawab atas wilayah perairannya.

Referensi

- “Doktrin Poros Maritim Jokowi di Myanmar”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141113125042-106-11288/doktrin-poros-maritim-jokowi-di-myanmar/>, diakses 5 Desember 2017.
- “Indonesia kembali calonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO Periode 2018-2019”, <http://dephub.go.id/post/read/indonesia-kembali-calonkan-diri-sebagai-anggota-dewan-imo-periode-2018-2019>, diakses 5 Desember 2017.
- “Indonesia Terpilih Kembali Sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019”, <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Terpilih-Kembali-Sebagai-Anggota-Dewan-IMO-Kategori-C--Periode-2018-2019.aspx>, diakses 5 Desember 2017.
- “Indonesia dan Sidang Majelis IMO 2017”, <https://jurnalmaritim.com/2017/11/29/indonesia-dan-sidang-majelis-imo-2017/>, diakses 5 Desember 2017.
- “Introduction to IMO”, <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx>, diakses 5 Desember 2017.
- James E Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff Jr. (2001). *Contending Theories of International Relations*, New York: Longman.